



## Konsep Kepemimpinan Islam Dalam Hadis

Alamsyahruddin Pasaribu<sup>1</sup>, Desi Kurniawan<sup>2</sup>, Murni Deliana<sup>3</sup>, Nurul Aini<sup>4</sup>,  
Yazid Hidayat<sup>4</sup>, Muhammad Nuh Siregar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia

Corresponding Author : [alamsyahruddin300125004@uinsu.ac.id](mailto:alamsyahruddin300125004@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

Kepemimpinan dalam Islam memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kekuasaan, penegakan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepemimpinan Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu kepemimpinan sebagai amanah dan tanggung jawab moral, etika kekuasaan, serta tanggung jawab sosial pemimpin terhadap rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data utama berupa kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, serta karya ulama klasik dan literatur pendukung yang relevan. Analisis data dilakukan melalui metode tematik (*maudhu'i*) dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan hadis-hadis kepemimpinan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkannya pada pandangan ulama klasik seperti al-Māwardī, al-Ghazālī, dan Ibn Taymiyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dengan keadilan dan kepedulian sosial sebagai tolok ukur utama legitimasi kepemimpinan. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan Islam dalam hadis relevan sebagai kerangka etis dalam menjawab problematika kepemimpinan di era kontemporer.

### Kata Kunci

*Kepemimpinan Islam, Hadis Nabi, Etika Kekuasaan, Tanggung Jawab Sosial.*

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan umat Islam. Dalam Islam, kepemimpinan tidak dipahami sekadar sebagai proses pengelolaan kekuasaan atau administrasi pemerintahan, melainkan sebagai amanah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan landasan normatif yang kuat mengenai hakikat kepemimpinan, tujuan kekuasaan, serta tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang kepemimpinan Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai etis dan kemanusiaan dilekatkan pada praktik kekuasaan dalam tradisi Islam.

Hadis Nabi Muhammad SAW memiliki peran sentral dalam merumuskan konsep kepemimpinan Islam. Hadis tidak hanya menjelaskan karakter ideal seorang pemimpin, tetapi juga menegaskan konsekuensi moral dari kekuasaan yang dijalankan. Berbagai hadis menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang kelak akan dimintai jawaban di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, hadis kepemimpinan berfungsi sebagai instrumen kontrol etis yang membatasi kekuasaan agar tidak menyimpang dari nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat.

Dalam konteks sosial-politik kontemporer, krisis kepemimpinan sering kali ditandai oleh lemahnya etika kekuasaan, rendahnya kepedulian sosial, serta maraknya penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menuntut adanya upaya reflektif untuk menggali kembali konsep kepemimpinan Islam yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Pendekatan hadis diharapkan mampu menawarkan kerangka normatif yang tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga relevan sebagai pedoman moral dalam membangun relasi yang adil antara pemimpin dan rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepemimpinan Islam dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu kepemimpinan sebagai amanah dan tanggung jawab moral, etika kekuasaan, serta tanggung jawab sosial pemimpin terhadap rakyat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan studi hadis dan kepemimpinan Islam, sekaligus menawarkan perspektif etis dalam menghadapi problematika kepemimpinan di era modern (Al-Mawardi, n.d.-a).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan karena objek kajian berupa teks-teks normatif keislaman, khususnya hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan Islam. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang memiliki otoritas keilmuan, baik berupa kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, maupun karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas kepemimpinan dan etika kekuasaan dalam Islam (Sugiono, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna kepemimpinan Islam secara mendalam dan komprehensif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik (*maudhu'i*) dalam kajian hadis. Metode ini dilakukan dengan cara menginventarisasi hadis-hadis yang relevan dengan tema kepemimpinan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan subtema, seperti kepemimpinan

sebagai amanah, etika kekuasaan, dan tanggung jawab sosial pemimpin terhadap rakyat. Selanjutnya, hadis-hadis tersebut dianalisis secara kontekstual dengan memperhatikan aspek makna (matan) serta relevansinya dengan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam. Pendekatan tematik dipilih karena dinilai efektif untuk menggali konsep normatif hadis secara sistematis dan tematis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik deskriptif-analitis. Data yang telah diklasifikasikan dianalisis dengan mengaitkan kandungan hadis dengan pandangan ulama klasik, seperti al-Māwardī, al-Ghazālī, dan Ibn Taymiyyah, guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan argumentatif. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan konsep kepemimpinan Islam dalam hadis yang menekankan dimensi etika kekuasaan dan tanggung jawab sosial. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hadis dan kepemimpinan Islam yang relevan dengan konteks sosial kontemporer (Mustaqim, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepemimpinan Sebagai Amanah dan Tanggung Jawab Moral**

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Amanah dalam kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, tetapi juga menyangkut komitmen seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat. Hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas menempatkan kepemimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan dimintai balasan di hadapan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat sosial dan politik, tetapi juga bersifat teologis (Al-Bukhārī & Ismā'īl, 2019).

Hadis **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** menegaskan bahwa setiap individu pada hakikatnya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Makna hadis ini mencerminkan konsep tanggung jawab moral yang melekat pada setiap bentuk kekuasaan, baik dalam skala kecil seperti keluarga maupun dalam skala besar seperti kepemimpinan negara (Al-Bukhari & Muslim, n.d.). Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam tidak dipandang sebagai hak istimewa, melainkan sebagai beban moral yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran etis.

Lebih jauh, hadis Nabi SAW juga memperingatkan bahaya penyalahgunaan amanah kepemimpinan. Dalam beberapa riwayat disebutkan

bahwa jabatan kepemimpinan dapat menjadi sumber kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat apabila tidak dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan imam tirmidzi No. 7146.

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرٌ

*"Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah (ﷺ) bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya dengan-Nya adalah imam yang adil. Dan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari-Nya adalah imam yang zalim."*

Peringatan ini menegaskan bahwa ambisi terhadap kekuasaan tanpa kesiapan moral merupakan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai kepemimpinan Islam (Ṣaḥīḥ Muslim, n.d.). Oleh karena itu, aspek moralitas menjadi parameter utama dalam menilai keberhasilan seorang pemimpin menurut perspektif hadis.

Kepemimpinan sebagai amanah juga meniscayakan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Pemimpin dalam Islam dituntut untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Tanggung jawab moral ini tercermin dalam hadis yang menegaskan bahwa pemimpin yang lalai terhadap kesejahteraan rakyatnya akan diharamkan dari surga (Al-Bukhari, n.d.). Dengan demikian, kepemimpinan dalam perspektif hadis bukan sekadar persoalan otoritas, melainkan manifestasi dari pengabdian dan komitmen moral demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.

### **Etika Kekuasaan Dalam Hadis Kepemimpinan**

Etika kekuasaan dalam Islam berakar kuat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah dan sarana mewujudkan kemaslahatan umat. Hadis-hadis kepemimpinan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak dimaksudkan sebagai alat dominasi, melainkan sebagai instrumen moral untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Nabi SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaan yang diembannya, sehingga etika kekuasaan dalam Islam selalu terkait dengan dimensi akhlak dan tanggung jawab spiritual.

Salah satu prinsip utama etika kekuasaan dalam hadis adalah keadilan. Hadis tentang tujuh golongan yang mendapat naungan Allah SWT pada hari kiamat menempatkan pemimpin yang adil sebagai figur yang memperoleh kedudukan istimewa di sisi-Nya (Al-Bukhari & Muslim, n.d.). Penegasan ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan tolak ukur legitimasi moral

kekuasaan dalam Islam. Kekuasaan yang dijalankan tanpa keadilan dipandang sebagai bentuk kezaliman yang berpotensi merusak tatanan sosial dan menyalahi tujuan utama kepemimpinan.

Selain keadilan, hadis Nabi SAW juga menekankan larangan penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu bertentangan dengan nilai etika kepemimpinan Islam. Nabi SAW memperingatkan bahwa jabatan kepemimpinan dapat menjadi sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat apabila tidak dijalankan secara benar (Muslim, n.d.). Hadis ini memperlihatkan bahwa Islam memandang kekuasaan sebagai beban moral yang harus dihindari apabila tidak disertai dengan kemampuan dan integritas yang memadai.

Ulama klasik turut memperkuat konsep etika kekuasaan sebagaimana tertuang dalam hadis. Al-Māwardī menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum (Al-Mawardi, n.d.-b). Sementara itu, al-Ghazālī menyatakan bahwa kekuasaan dan agama merupakan dua pilar yang saling menopang; agama membutuhkan kekuasaan untuk menjaga ketertiban, dan kekuasaan membutuhkan agama sebagai pedoman etika

وَالْمَلِكُ وَالِدِينُ تَوْأَمَانِ فَالِدَيْنِ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

*"Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang".*

Pandangan ini menunjukkan bahwa etika kekuasaan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan spiritual.

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah menekankan bahwa keadilan merupakan fondasi utama keberlangsungan negara. Ia menyatakan bahwa negara yang adil akan tetap tegak meskipun dipimpin oleh non-Muslim, sedangkan negara yang zalim akan hancur meskipun dipimpin oleh Muslim (Ibn Taymiyyah, n.d.). Pernyataan ini menegaskan bahwa etika kekuasaan dalam hadis kepemimpinan bersifat universal dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, hadis Nabi SAW dan pandangan ulama klasik menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam harus dijalankan secara etis, adil, dan bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan sosial.

### **Tanggung Jawab Sosial Pemimpin Terhadap Rakyat**

Tanggung jawab sosial pemimpin terhadap rakyat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam konsep kepemimpinan Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan tidak dipahami sebagai sarana memperoleh kehormatan atau kekuasaan semata, melainkan sebagai amanah untuk

mengurus dan melindungi kepentingan masyarakat. Pemimpin dituntut untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat serta menjaga mereka dari ketidakadilan dan penindasan. Hadis *kullukum rā'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi* menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kondisi sosial masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya.

Hadis Nabi SAW juga secara tegas mengaitkan keselamatan pemimpin di akhirat dengan kesungguhannya dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pemimpin yang menipu dan mengabaikan rakyatnya tidak akan mencium bau surga ("Ṣaḥīḥ Muslim," n.d.). Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tuntutan moral dan spiritual. Pemimpin yang lalai terhadap penderitaan rakyat dipandang telah mengkhianati amanah kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Tanggung jawab sosial pemimpin mencakup perlindungan hak-hak masyarakat, terutama kelompok lemah dan rentan. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya pemimpin hadir sebagai pelindung (ḥāmī) bagi rakyatnya, bukan sebagai pihak yang menindas atau mengeksploitasi. Dalam praktik kepemimpinannya, Rasulullah SAW senantiasa mendahulukan kepentingan umat, bahkan dalam kondisi keterbatasan sumber daya (Al-Bukhari, n.d.) Keteladanan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial pemimpin menuntut empati, keberpihakan, dan komitmen terhadap kesejahteraan kolektif.

Ulama klasik menegaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan inti legitimasi kepemimpinan. Al-Māwardī menyatakan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah menjaga kemaslahatan umum (ḥifẓ al-maṣāliḥ) dan mencegah kerusakan sosial (dar' al-mafāsīd) (Al-Mawardi, n.d.-b). Menurutny, kegagalan pemimpin dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat dapat melemahkan stabilitas negara dan merusak kepercayaan publik. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab sosial sebagai indikator utama keberhasilan kepemimpinan dalam Islam.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh al-Ghazālī yang menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban moral untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan bahwa kemiskinan, ketidakadilan, dan kelalaian penguasa terhadap rakyat merupakan faktor utama kehancuran Negara (Al-Ghazālī & Muḥammad, n.d.). Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk memiliki sensitivitas sosial dan kemampuan mengelola kekuasaan demi kepentingan bersama, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah menekankan bahwa tanggung jawab sosial pemimpin merupakan manifestasi dari prinsip keadilan yang menjadi fondasi keberlangsungan negara. Ia menegaskan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat akan kehilangan legitimasi moralnya (Ibn Taymiyyah, n.d.). Dengan demikian, hadis Nabi SAW dan pandangan ulama klasik menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam mensyaratkan tanggung jawab sosial yang nyata dan berkelanjutan, demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian terhadap hadis-hadis kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kekuasaan tidak dipandang sebagai hak istimewa, melainkan sebagai beban tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Prinsip ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat administratif atau politis, tetapi juga bersifat teologis dan etis, sehingga menuntut integritas moral dari setiap pemimpin.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa etika kekuasaan merupakan elemen fundamental dalam konsep kepemimpinan Islam. Hadis-hadis Nabi SAW menempatkan keadilan sebagai tolok ukur utama dalam menjalankan kekuasaan serta melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan yang dijalankan tanpa keadilan dipandang sebagai kezaliman yang bertentangan dengan tujuan utama kepemimpinan. Pandangan ulama klasik seperti al-Māwardī, al-Ghazālī, dan Ibn Taymiyyah semakin menegaskan bahwa kekuasaan hanya memiliki legitimasi apabila diarahkan untuk menjaga agama, mewujudkan kemaslahatan umum, dan menegakkan keadilan sosial.

Selain itu, tanggung jawab sosial pemimpin terhadap rakyat merupakan konsekuensi logis dari amanah kepemimpinan dalam Islam. Hadis Nabi SAW secara tegas mengaitkan keselamatan pemimpin di akhirat dengan kesungguhannya dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat. Pemimpin dituntut untuk berpihak kepada kepentingan publik, melindungi kelompok lemah, serta memastikan terpenuhinya keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, konsep kepemimpinan Islam dalam hadis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan sebagai kerangka etis dalam menjawab problematika kepemimpinan di era kontemporer.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al- Bukhari & Muslim. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari dan Muslim*.
- Al-Bukhari. (n.d.). *Şahih al-Bukhārī*. In *Kitab Al-Ahkam*.
- Al-Bukhārī, & Ismā'īl, M. (2019). *Şahih al-Bukhārī*. In *Kitab al-Ahkam*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazālī, & Muḥammad, A. Ḥāmid. (n.d.). , *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. In *Dār al-Fikr: Juz II* (pp. 119–121).
- Al-Mawardi. (n.d.-b). *al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah: (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)* (pp. 15–17).
- Ibn Taymiyyah. (n.d.). *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Işlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah* . In *Dār al-Kutub al-Ḥadīthah* (p. 13).
- Mustaqim, A. (2017). *Metode Penelitian Hadis* . Idea Press.
- Şahih Muslim. (n.d.). In *Kitab al-Imārah*.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* . Alfabeta.